



► PENCEGAHAN PENYAKIT

Ratusan Tempat Usaha Ditutup Paksa

UMBULHARJO—Satgas Penegakan Hukum Penanganan Covid-19 DIY menutup paksa sedikitnya 300 tempat usaha yang nekat buka di luar ketentuan durasi waktu selama PPKM Darurat.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rachmat mengakui masih banyak menemukan pelanggaran nyaris setiap hari selama penerapan PPKM Darurat sejak Sabtu (3/6).

Padahal sebelumnya sosialisasi terkait dengan aturan PPKM Darurat telah diberikan terutama pada sektor non-esensial.

Bentuk pelanggaran rata-rata tempat usaha adalah nekat buka di luar ketentuan aturan hingga tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Penegakan prokes selama tiga hari, PPKM darurat, kami masih menemukan pelanggaran banyak sekali di lapangan,” kata Noviar dalam Rapat Koordinasi Penanganan



► Masih banyak pelanggaran dalam tiga hari pelaksanaan PPKM Darurat.

► Pelaksanaan dilakukan dalam tiga sif antara pagi, siang dan malam.

Covid-19 di DPRD DIY, Selasa (6/7).

Noviar menyatakan, hingga kemarin timnya yang tergabung dengan TNI dan Polri telah menutup ratusan tempat usaha yang melanggar ketentuan jam buka. Pelaksanaan dilakukan dalam tiga sif antara pagi, siang dan malam dengan menasar titik yang biasa terjadi kerumunan di sejumlah wilayah DIY.

Pembubaran paksa itu dilakukan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan.

“Sampai hari ini [kemarin] jumlah pelanggaran terhadap kegiatan masyarakat di sektor non-esensial yang sudah kami tutup paksa sebanyak 312 tempat usaha. Tempat makan yang tidak melayani *take away* ada 146 warung, itu juga kami bubarkan dan tujuh tempat kami segel,” katanya.

Ia berharap selama sepekan ke depan masyarakat lebih patuh sehingga dapat menekan kasus positif Covid-19. “Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat kami berharap selama sepekan ke depan tingkat kepatuhan masyarakat semakin tinggi dengan harapan ada penurunan kasus positif saat masyarakat sudah banyak di rumah daripada beraktivitas di luar,” katanya.

Ketua DPRD DIY Nuryadi memberikan dukungan kepada Satgas dalam melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan jangka panjang, dengan harapan kasus Covid-19 bisa menurun dan masyarakat bisa beraktivitas normal. Ia mengimbau kepada warga DIY untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.

“Ketika dalam penegakan aturan ini perlu payung hukum seperti yang tadi disinggung tentang posisi [Satgas, Satpol PP] kami di silahkan, kami [legislatif] membuka komunikasi, waktu itu sudah muncul [payung hukum], kenapa hilang. Sehingga ketika satpol PP mengambil langkah tidak menyalahi itu baik posisi masyarakat langsung maupun dengan kabupaten dan kota,” katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005